

KONFLIK PARTAI: PERBANDINGAN ANTARA PKB DAN PDIP

Muhtar Haboddin

Staf Pengajar Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya Malang

Abstrak

Tulisan ini memfokuskan diri pada kajian konflik yang terjadi dalam tubuh PKB dan PDIP. Studi perbandingan ini menarik, bukan saja karena jumlahnya masih kurang dilakukan tetapi juga memberikan ruang yang cukup luas dalam mendalami anatomi konflik yang terjadi di PKB maupun di PDIP. Pada kedua partai ini tidak pernah lepas dari intrik dan konflik. Hasil kajian menunjukkan bahwa terdapat model konflik. Pertama, konflik secara horizontal dimana yang terlibat dalam konflik ini adalah para petinggi partai politik. Konflik ini biasa terjadi pada saat pemilihan ketua umum partai. Kedua, konflik yang terjadi secara vertikal. Konflik senantiasa terjadi dalam konteks pemilihan kepala daerah. Implikasi yang ditimbulkan akibat konflik adalah terjadinya perpecahan di partai PKB maupun PDIP.

Kata Kunci: Konflik Partai, PKB, PDIP

Pendahuluan

Salah satu fungsi partai politik adalah manajemen konflik. Namun, dalam konteks partai politik Indonesia fungsi ini tidak bisa dilakukan, dijalankan dengan baik oleh hampir semua partai politik. Dikatakan demikian karena hampir semua partai politik, baik yang besar maupun yang kecil, tidak pernah sepi dari konflik yang terjadi dalam dirinya sendiri¹.

Kondisi seperti itu menyebabkan energi partai politik habis terkuras hanya soal-soal yang tidak substansial. Konflik selalu muncul menjelang atau sesudah kongres atau muktamar partai². Inilah fenomena rutin yang

¹ Sultani 'Partai Baru Diantara Pemilih Yang Ragu' *Kompas*, 2 Oktober 2006. Periksa juga Muhtar Haboddin 'Mengurai Perpecahan Partai Politik' Makalah Mata Kuliah Politik Indonesia Kontemporer, Tahun Ajaran 2007. Lihat juga Saiful Mujani 'Konflik-konflik Dalam Partai Politik' *Kompas*, 3 Desember 2001; Azyumardi Azra 'Menunggu Pemimpin Baru' *Kompas*, 24 April 2007.

² Sultani, *ibid*.

selalu kita saksikan. Sebuah fenomena yang tidak sehat dalam kacamata demokrasi yang mengisaratkan pentingnya pengelolaan konflik bagi aktor yang terlibat dalam wacana bagi-bagi kekuasaan dalam rangka mendapatkan posisi tertinggi dalam struktur kepengurusan partai politik.

Ketidakmampuan elit partai dalam mengelola konflik dalam tubuhnya, baik sebelum maupun pasca kongres/muktamar mengindikasikan belum terlembaganya partai politik secara baik, kata I Ketut Putra Erawan. Pendapat ini tentu saja relevan dalam melihat konflik yang terjadi dalam tubuh PKB maupun PDIP. Bahkan kedua partai ini sudah dihindangi penyakit kronis yang kian akut. *Pertama*, bahwa konflik dalam partai itu terjadi karena personalitas individu. Misalnya Gus Dur di PKB dan Mega di PDIP. Pandangan yang *kedua*, mengatakan bahwa konflik dalam tubuh partai karena pelembagaan aturan main yang tidak dipatuhi seperti di PKB. Pandangan yang pertama tidak terlalu banyak dibicarakan dalam tulisan ini. Tetapi akan lebih banyak membicarakan pandangan kedua.

Paper ini mengambil tema konflik dalam tubuh partai perbandingan antara PKB dengan PDIP. Pilihan kajian ini sangat cocok karena masih tergolong langka. Karena itu, menjadi tantangan bagi penulis untuk menyingkap konflik yang terjadi dalam tubuh kedua partai tersebut. Apalagi ada indikasi yang kuat bahwa terjadinya konflik dalam PKB maupun PDIP bukan karena, *pertama*, intervensi pemerintah sebagai yang terjadi dalam sejarah konflik partai politik di era Orde Baru. *Kedua*, konflik juga terjadi bukan karena perbedaan ideologi atau visi politik, namun yang lebih mungkin adalah pertentangan kepentingan-kepentingan individu dari masing-masing tokoh itu sendiri dalam berebut dan mempertahankan *status quo*-nya.

Dua indikasi ini menggiring kita pada pemahaman bahwa konflik dalam tubuh partai PKB dan PDIP bersumber dalam dirinya sendiri. Mereka saling menanduk—mereka saling meniadakan—bahkan mereka saling berkelahi demi jabatan Ketua Umum. Untuk mendapatkan jabatan Ketua Umum mereka tidak malu-malu menelikung Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga partai politik demi mempertahankan ‘sang jago’. Hal ini terjadi di PKB dan PDIP.

Paper ini berangkat dari pertanyaan mengapa konflik terjadi dalam PKB dan PDIP? Lalu, dilanjutkan dengan membandingkan konflik yang

terjadi dalam tubuh PKB dan PDIP. Sebelum membandingkan konflik terlebih dahulu akan dipaparkan konseptualisasi konflik, lalu dilanjutkan dengan melihat sumber penyebab konflik kedua partai politik pasca kejatuhan Soeharto. Kemudian berdasarkan itu akan ditelusuri pula tipologi konflik.

Konflik sebagai Kerangka Pikir

Partai politik sebagai wadah atau muara bertemunya banyak kepentingan sudah barang tentu rawan terjadi konflik. Partai politik sebagai organisasi modern akan selalu dihadapkan pada realitas konflik. Misalnya saja konflik yang berupa perbedaan pandangan, ide atau paham, dan pertentangan kepentingan dan seterusnya.

Bersamaan dengan itu, Marck dan Synder mengatakan konflik atau perpecahan dalam tubuh partai bisa timbul dari kelangkaan posisi dan *resources*. Makin sedikit posisi atau sumber yang dapat diraih setiap anggota atau kelompok dalam organisasi politik, makin tajam konflik dan persaingan di antara mereka untuk merebut posisi dan sumber itu. Selanjutnya, dikatakan di dalam hirarki sosial dimana pun hanya ada sejumlah terbatas posisi sosial kekuasaan yang nyata dan tidak lebih dari seseorang yang dapat mendudukinya³.

Sedangkan Paul Conn mendefinisikan konflik sebagai bentuk disfungsional dimana aktor-aktor yang terlibat dalam perebutan kekuasaan berusaha saling menghancurkan⁴. Konflik yang dibahasakan oleh Conn ini lebih populer dengan sebutan *zero sum conflict*. Pemahaman Conn tentang konflik tersebut sedikit banyak membantu kita dalam memahami konflik yang terjadi dalam tubuh PKB maupun PDIP. Akibat dari penerapan *zero sum conflict* sebagai kebijakan politik partai membangkitkan semangat tokoh-tokoh yang tersingkirkan mengartikulasikan kepentingan mereka dengan menentang norma-norma dan struktur kekuasaan yang ada⁵. Hal inilah yang dipraktikkan oleh para penggagas Gerakan Pembaharuan PDIP.

³ Lihat Syamsuddin Haris 'Pola dan Kecenderungan Konflik Partai Politik Masa Orde Baru' *Jurnal Analisis CSIS*, 1988. hlm. 271.

⁴ Lebih lanjut periksa Leo Agustino 'Konflik dan Pembangunan' *Jurnal Analisis CSIS*, Vol. 33, No.3, 2004. hlm. 329. Ramlan Surbakti *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo, 1992. hlm. 154.

⁵ Hugh Mall dkk, *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*, Jakarta: Rajawali, 2002. hlm. 23.

Atau gerakan gugat-menggugat dalam tubuh PKB sebagaimana dilakukan oleh kubu Matori terhadap kubu Alwi Shihab; kubu Alwi Shihab terhadap Muhaimin.

Memahami Konflik dalam Tubuh PDIP dan PKB

Penerapan kebijakan *zero sum conflict* membuat konflik semakin melebar karena memungkinkan pihak-pihak lain menarik dirinya untuk terlibat. Hal inilah yang kita saksikan dalam tubuh PKB maupun PDIP. Kedua partai ini benar-benar dililit oleh konflik.

Dalam konteks PKB. Saking terjerembabnya dalam pusaran konflik hingga PKB pun diplesetkan menjadi “Partai Khusus Berkelahi”, demikian kata KH Mustafa Bisri. Deklarator ini tampaknya kesal menyaksikan konflik internal partai yang tak kunjung usai. Bahkan konflik terus menerpa yang berujung pada keretakan hubungan Gus Dur dengan Matori. Gus Dur dengan para kiai. Keretakan hubungan semacam ini sangat baik dijelaskan oleh Syamsuddin Haris dalam tulisannya *Potret PKB: Peta Konflik dan Resistensi Elit Lokal Terhadap Pusat*⁶.

Tentang konflik Gus Dur dengan Ketua PBNU, KH Hasyim Muzadi patut juga dikedepankan. Karena konflik Gus Dur versus KH Hasyim Muzadi terjadi ketika Gus Dur maju menjadi Capres yang mengharuskan warga NU memilihnya, sementara KH Hasyim Muzadi berulang kali menyatakan bahwa warga NU bebas memilih siapa saja. Konflik antar dua figur ini berimplikasi pada kaum *nahdliyin*.

Rentetan konflik yang terjadi di tubuh PKB bermula sebelum maupun sesudah Gus Dur menjadi presiden, berlanjut pada Matori dipecat menjadi Ketua Umum, disusul dengan pemecatan Alwi Shihab-Saifullah Yusuf hingga terbentuknya kepemimpinan kembar PKB sebagai reaksi terhadap kebijakan Gus Dur. Konflik ini tidak hanya terjadi pada level Jakarta tetapi juga merambah pada level daerah. Begitu dashyatnya konflik itu sehingga “perjalanan partai ini tak kunjung reda dirundung konflik”, tutur Indris Thoha⁷.

⁶ Syamsuddin Haris ‘Potret PKB: Peta Konflik dan Resistensi Elit Lokal Terhadap Pusat’ dalam Lili Romli (ed), *Potret Partai Politik Pasca Orde Baru*, Jakarta: LIPI, 2003. hlm.83-103

⁷ Indris Thoha (ed), *Pergulatan Partai Politik di Indonesia* Jakarta: Rajawali, 2004. hlm.240.

Konflik yang akut di tubuh PKB juga menimpa PDIP. Partai ini sudah menjadi langganan konflik. Bahkan PDIP yang merupakan salah satu pecahan dari PDI tidak jera-jeranya dihantam konflik. Konflik sudah menjadi bagian dari sejarah kehadiran dan perjalanannya. Aroma konflik dalam tubuhnya telah berhasil melahirkan empat partai politik yakni, Partai Indonesia Tanah Airku (PITA) yang diketuai Dimiyati Hartono, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) dikomandani Eros Djarot, Partai Demokrasi Perjuangan (PDP) oleh Handoko Yudha dan Partai Demokrasi Pembaharuan (DPP). Kehadiran partai ini menunjukkan bahwa konflik sudah mendarah daging dalam PDIP. Pertanyaan kita adalah mengapa para petinggi di DPP maupun DPW PDIP tidak menghindar atau paling tidak belajar sambil mengambil hikmah dari konflik itu.

Ketidakmampuan orang-orang PDIP dalam mengambil hikmah dan mengelola konflik yang bersarang dalam tubuhnya mengingatkan kita pada analisis yang dimuat *Sinar Harapan*. Harian ini melaporkan:

PDI(P), belakangan ini kembali menjadi bahan pembicaraan. Masyarakat ramai. Ricuh lagi, kalut lagi. Sampai-sampai ada yang mengatakan bahwa, justru kericuhan itu merupakan ciri khas PDI(P) sebagai partai yang 'demokratis'. Karena demokratisnya, siapa saja dalam partai itu kalau dirinya menurut interpretasinya sendiri berhak memecat siapa yang tidak disenangi, maka dipecatlah orang yang tidak disukai itu. Juga siapa saja dalam partai itu kalau menurut tafsirnya sendiri, ia berhak menjadi ketua, maka diangkatlah dirinya sendiri menjadi ketua. Begitulah seterusnya. Suatu contoh penerapan asas demokrasi yang paling chaos dan anarkis⁸

Penggalan kutipan ini menggambarkan dengan jelas dinamika kehidupan PDIP yang senantiasa bergelimang dalam konflik-konflik internal. Sebuah situasi konflik yang tak "kunjung usai". Sialnya lagi, konflik itu tidak pernah diselesaikan secara tuntas. Paling yang biasa dilakukan meminjam istilah Manuel Kaisipo bahwa konflik hanya diakhiri melalui 'penyelesaian politis', bukan penyelesaian yang bersifat organisatoris berdasarkan peraturan konstitusional. Karena itu tidak mengherankan bahwa kemudian terjadi lagi konflik diantara mereka⁹.

⁸ *Sinar Harapan*, 3 Desember 1978.

⁹ Farchan Bulkin (ed), *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES, 1991. hlm. 325.

Inilah potret diri partai PDIP maupun PKB, dimana manajemen konflik kepartaian belum jalan. Akhirnya, yang kita saksikan adalah gugurnya kader-kader terbaik partai. Lemahnya pengelolaan konflik dalam tubuh partai mengakibatkan, baik PKB maupun PDIP mudah pecah. Hal ini dikarenakan manajemen partai yang rapuh dan dikelola dengan cara primitif.

Menelisik Penyebab Konflik Antara PKB dan PDIP

Aneka konflik yang terjadi dalam tubuh PKB dan PDIP sebagaimana digambarkan di atas menunjukkan bahwa dinamika partai politik tidak sehat. Karena itu meninjau ulang konflik yang terjadi menjadi penting ditelusuri faktor penyebabnya. Sedikitnya ada dua alasan yang menjadi faktor penyebab konflik di PKB maupun di PDIP. *Pertama*, karena perebutan ketua umum partai. *Kedua*, gugatan terhadap AD/ART masing-masing partai.

1. Penyebab Konflik PDIP

▪ *Rebutan Jabatan Ketua Umum PDIP*

Jabatan Ketua Umum PDIP selalu diincar oleh semua kader partai politik. Hal ini terjadi karena posisi Ketua Umum hanya satu sementara yang menginginkan jabatan itu begitu banyak maka persaingan menjadi suatu keharusan. Megawati yang selama ini menduduki dan merasakan nikmatnya jabatan Ketua Umum ditantang oleh orang-orang dekatnya sendiri. Nama-nama seperti Eros Djarot, Dimiyati Hartono, Kwik Kian Gie, Roy B.B Janis, Sophan Sophian, Laksamana Sukardi, Guruh Soekarnoputra, Arifin Panigoro adalah nama-nama yang patut dicatat dalam lembaran sejarah perjalanan PDIP. Orang-orang ini pula patut dicatat bukan karena keberaniannya untuk menjadi rival Mega dalam perebutan jabatan Ketua Umum tetapi langkah yang ditempuhnya merupakan terobosan baru bagi PDIP itu sendiri.

Munculnya Eros Djarot dan Dimiyati pada kongres di Semarang (27 Maret 2000) menunjukkan gejala baru dimana perebutan Ketua Umum PDIP akan semakin ketat dan seru. Dikatakan seru karena dua kelompok akan bersaing untuk perebutan posisi Ketua Umum. Dalam tradisi PDIP persaingan yang berkaitan dengan perebutan posisi pimpinan, menjelang

kongres terjadi, dikarenakan setiap orang ataupun kelompok mempunyai hak yang sama untuk memperebutkan jabatan pimpinan partai¹⁰.

Dalam kongres PDIP di Semarang ada dua kelompok berhadapan dan masing-masing kelompok punya agenda politik dan kelompok pendukung. Kedua kelompok itu adalah, *pertama*, kelompok konservatif yang menginginkan Megawati tetap memimpin PDIP. *Kedua*, kelompok progresif yang menginginkan Megawati berkonsentrasi sebagai Wakil Presiden saja¹¹. Pertarungan dua kelompok ini dimenangkan oleh kelompok konservatif yang pro Mega sedangkan kelompok progresif yang dimotori Eros Djarot dan Dimiyati Hartono terpental sebelum resmi menjadi bursa calon PDIP.

Terpentalnya Eros dan Dimiyati dari bursa calon menimbulkan tanda tanya. Eros Djarot dengan nada kritis mengatakan:

Ada upaya penjagalan dirinya sebagai calon ketua umum. Menurutnya, penjagalan itu terjadi karena ada kader Pengurus DPP PDIP yang sengaja mencoret namaku dari utusan dalam kongres di Semarang. Dan kelompok ini sangat menghendaki Mega menjadi calon tunggal¹².

Pengakuan Eros patut direnungi. Sebuah pengakuan yang berbau diskriminasi oleh Pengurus DPP PDIP dengan mengorbankan kadernya sendiri. Cara-cara yang tidak demokrasi ternyata dilakukan demi mendudukkan sang jago. Para pengurus PDIP lupa bahwa dengan cara seperti itu bukan hanya melanggar etika tetapi juga menambah daftar panjang konflik dalam tubuh PDIP. Hasil akhir dari kongres Semarang dibuktikan dengan keluarnya Eros dan Dimiyati dari PDIP. Bersamaan dengan itu, konflik internal juga semakin meruncing antara Haryanto Taslam dengan beberapa kader PDIP. Konflik Semarang dalam perebutan kursi dipucuk pimpinan partai menyimpan rasa sakit hati, tidak puas, karena kongres itu terkesan dimanipulasi hasilnya dan pelakunya adalah DPP PDIP.

Belum sembuh luka itu, dan konsolidasi internal partai belum berjalan baik. Tiba-tiba masa kepemimpinan Mega pun usai. Itu tandanya

¹⁰ Lihat Andriana Elisabeth dkk, *PDIP dan Prospek Pembangunan Politik*, Jakarta: Grasindo, 1991. hlm. 64.

¹¹ Salomon Simanjuntak, *Indonesia Dalam Krisis 1997-2002*. Jakarta: Kompas, 2002. hlm. 190.

¹² Bambang Setiawan dan Bestian Nainggolan *Partai-Partai Politik di Indonesia* Jakarta: Kompas, 2004. hlm.164.

kongres II akan dilaksanakan. Bali adalah kota pilihan. Akhir bulan Maret 2005 PDIP kembali bulan-bulanan karena agenda pemilihan ketua umumnya. Acara kongres II PDIP di Bali kembali diwarnai konflik. Dengan kubu yang sama tetapi aktornya yang berbeda. Jika pada kongres Semarang antara kubu konservatif berhadapan kubu progresif. Maka kongres II di Bali yang bertanding adalah kubu konservatif berhadapan dengan kelompok pembaharuan¹³.

Pertarungan dua kubu ini menyita perhatian peserta kongres. Apalagi kelompok yang bernama 'gerakan pembaharuan' PDIP melakukan perlawanan terhadap Mega. Perlawanan dua kubu yang siap menanduk itu diilustrasikan oleh Eros Djarot melalui artikelnya yang bertajuk: *Antara Bitter Comody dan Ironi*. Ia menulis:

PDIP menggeliat, terpecah dalam dua kubu dan berhadapan dengan posisi yang siap untuk saling menanduk. Banteng pro status quo dan pro pembaharuan ternyata tak lagi bisa menyatu. Keduanya berdiri di atas kebenaran subjektif kelompok masing-masing. Kubu status quo, yang menghendaki PDIP tetap dipimpin Mega, bersikeras menyakini bahwa PDIP harus tetap mempertahankan 'si Mbak' yang mantan presiden. Sementara pro pembaharuan, menghendaki 'sang adik', Guruh Soekarno Putra, yang dipandang layak memimpin. 'Pertarungan' pun menjadi menarik karena keduanya anak Bung Karno dan kader PDIP pula¹⁴.

Hasil akhir dari pertarungan kelompok status quo dengan gerakan pembaharuan kembali dimenangkan oleh kelompok status quo. Gerakan pembaruan terpental karena tidak berhasil merobohkan dinding kekuasaan yang bernama 'aturan main' alias AD/ART. Kalahnya kelompok gerakan pembaharuan bisa ditafsirkan sebagai wujud kemenangan itu sendiri. Disebut kemenangan karena gerakan pembaharuan memaksa kelompok status quo untuk mencederai demokrasi melalui pemilihan Mega secara 'aklamasi'.

¹³ Kelompok Pembaruan ini dicetuskan oleh Guruh, Arifin Panigoro, Roy B.B. Janis, Laksamana Sukardi, Sophan Sophian.

¹⁴ Eros Djarot 'Antara Bitter Comody dan Ironi' *Kompas*, 31 Maret 2005.

▪ *Menggugat AD/ART -PDIP*

Terpilihnya Mega dengan secara 'aklamasi' dinilai oleh gerakan pembaharuan PDIP cacat demi hukum. Roy B.B. Janis selaku Pelaksana Harian Gerakan Pembaharuan PDIP mengatakan bahwa kongres Bali telah:

Melanggar AD/ART partai. Mekanisme pengambilan keputusan dan pemilihan dalam kongres—yaitu, dengan tetap menggunakan format tunggal, aklamasi dan menetapkan calon tunggal—dinilai tidak demokratis, sehingga keputusannya dianggap paternalistik, feodal dan elitis¹⁵.

Gugatan gerakan pembaharuan PDIP terhadap Mega melalui AD/ART menarik untuk ditelaah. Karena dari awal gerakan pembaharuan memperlakukan AD/ART dan meminta pada partai untuk melakukan pembaharuan manajemen partai dengan menghapus hak prerogatif, format tunggal dan mengusulkan dua lembaga baru: dewan pengurus dan dewan pengarah.

Usulan ini diapresiasi dengan baik oleh I Ketut Putra Erawan. Dalam analisis yang bertajuk: *Reformasi PDIP Perlu langkah Baru* di *Harian Bali Pos*, I Ketut P Erawan, menulis:

Manuver yang dilempar gerakan pembaharuan bertujuan untuk memangkas struktur yang monolitik dan keberadaan kaum pembisik dalam tubuh partai. Bahkan kelompok gerakan pembaharuan ini juga menginginkan Mega diganti sembari mengusulkan nama-nama seperti Guruh Soekarno Putra, Sophan Sophian, dan Roy Janis¹⁶.

Usulan yang baik tidak mesti ditanggapi dengan arif nan bijak. Itulah yang dipraktikkan oleh Mega. Dengan berlindung atas nama kebijakan partai maka gerakan pembaharuan dijatuhi sanksi ganda dengan memecat 12 kadernya karena dinilai melanggar AD/ART karena menolak hasil kongres PDIP di Bali. Sanksi lain adalah, kadernya yang duduk di parlemen di-*recall*¹⁷

Langkah Mega dalam mendisiplinkan anggotanya berdasarkan pasal 20 dan 21 AD/ART—yang pada intinya memberikan Mega kewenangan

¹⁵ Anton Djawamaku 'Perpecahan Parpol, Pemberantasan Korupsi dan Berbagai Masalah Lainnya' *Analisa CSIS*, Vol.34. No.2.2005. hlm.134.

¹⁶ I. Ketut P Ertawan 'Reformasi PDIP Perlu langkah Baru', *Bali Pos*, 12 Februari 2005.

¹⁷ *Majalah Tempo*, 22 Mei 2005.

mengambil langkah organisatoris dalam tubuh partai. Kedengarannya normatif, tapi di lapangan pasal itu dipakai untuk menggasak kader partai yang tidak sejalan dengannya.

2. Penyebab Konflik PKB

▪ *Rebutan Jabatan Ketua PKB*

Siapa yang tidak menginginkan Ketua Umum partai. Aku menginginkan Ketua Umum partai. Alasan kuat yang mendorong munculnya keinginan itu karena ketua partai mempunyai kekuasaan yang cukup besar. Misalnya Ketua Umum PKB berwenang menetapkan kebijakan partai tingkat nasional sesuai AD/ART, mengesahkan komposisi dan personalia DPW dan DPC, membekukan kepengurusan DPW dan DPC karena pelanggaran.

Dengan kewenangan yang cukup besar itu membuat kader PKB tergiur untuk menuju puncak pimpinan. Pertarungan secara bijak, demokratis dalam menuju piramida teratas mestinya ditegakkan oleh setiap insan. Tetapi kenyataannya harapan itu tidak pernah terwujud. Bahkan semakin menjauh. Tiga kali diadakan suksesi kepemimpinan dalam tubuh PKB rentan dengan warna konflik. Model suksesinya sangat primitif sifatnya. Saya katakan demikian karena ketika Matori dilengserkan sebagai Ketua Umum PKB tidak melalui muktamar tetapi melalui pemecatan.

Nasib Matori baru terselesaikan secara organisatoris lewat muktamar Luar Biasa di Yogyakarta (20 Januari 2002) berbarengan dengan terpilihnya Alwi-Saifullah. Duet Alwi-Saifullah tidak bertahan lama. Nasibnya pun mengikuti Matori. Yakni 'dipecat oleh Gus Dur'¹⁸ yang disertai dengan Muktamar II PKB di Semarang. Dalam muktamar tersebut Muhaimin Iskandar terpilih dengan calon tunggal.

Konflik pun bergerak dalam tubuh PKB. Kepengurusan kembar kembali terjadi, yakni PKB versi Alwi dengan PKB versi Muhaimin. Keduanya saling mengklaim. Metode gugat-menggugat pun dipraktikkan. Majalah Tempo memberitakan bahwa pertikaian dua kubu dengan memainkan jurus-jurus perlawanan. Bara pertikaian tak kunjung usai meski

¹⁸ *Majalah Tempo*, 28 Agustus 2005

Departemen Hukum dan HAM sudah menyatakan PKB versi Muhaimin diakui sedangkan PKB versi Alwi-Saifullah terkalahkan¹⁹.

Kemenangan Muhaimin berdasarkan Departemen Hukum dan HAM mendapat perlawanan dari Alwi. Dengan percaya diri Alwi mengatakan bahwa dirinya tetap Ketua Umum PKB. Pernyataan Alwi mendapat dukungan dari Kyai Langitan. Akibat dari resistensi itu Muhaimin tambah galak dengan melakukan *recall* bagi PKB versi Alwi yang sudah duduk di parlemen²⁰. Begitulah cerita konflik dalam menduduki piramida Ketua Umum di PKB.

- *Memaniplulasi AD/ART PKB*

Cerita penuh konflik tentang perebutan jabatan di tubuh PKB tidak berhenti pada sikap copot-mencopot, pecat-memecat sampai pe-*recall*-an di lembaga eksekutif maupun legislatif. Tetapi dan perlu pula dikedepankan bahwa salah satu penyebab lain dari konflik menjelang muktamar di Semarang adalah pelanggaran AD/ART yang dilakukan oleh orang-orang Muhaimin Iskandar dengan memanipulasi jalannya sidang.

Cara inilah yang dipraktikkan Pemimpin Sidang Misbach Hidayat, mengetuk palu, lalu mengambil keputusan dalam hitungan detik; Gus Dur dinyatakan sah terpilih secara aklamasi. Cara penetapan ini diprotes Ketua Pengurus Wilayah Jawa Timur, Chairul Anam dengan mengatakan ini inkonstitusional. Protes Anam ditanggapi Arifin Junaidi, Ketua Komisi Pengarah Muktamar mengatakan penetapan itu sah. Ia menyebutkan Tata Tertib rapat menyebutkan forum pleno muktamar rapat tertinggi untuk mengambil keputusan tanpa harus dihadiri cabang²¹.

Silang pendapat terjadi di arena muktamar di Semarang. Kubu Saifullah, Anam, Ma'rif Amin dan beberapa kyai dengan jelas mengatakan bahwa terjadi pelanggaran AD/ART. AD/ART sebagai 'aturan main' ditafsir secara subjektif untuk mendudukkan Gus Dur pada posisinya semula. Kubu Muhaimin, Misbach, Junaidi bertahan pada pendirinya. Persoalan sah dan tidak sah sebagaimana didebatkan oleh para peserta muktamar menyisakan tiga catatan kritis, yakni;

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

²¹ Majalah Tempo, 1 Mei 2005

Pertama, metode persidangan aklamasi ini memang sengaja dilakukan agar jangan sampai Gus Dur kehilangan muka. Jika alasan ini benar tentu saja kita sangat kecewa. Mengapa? Karena model pemilihan aklamasi mengingatkan kita pada tradisi politik yang dikembangkan Orde Baru. Sebuah tradisi yang dimulai dengan proses penjaringan orang pertama partai dari atas. Sang calon Ketua biasanya sudah ditetapkan jauh hari sebelum pemilu. Arena pemilihan dibuat sedemikian rupa agar sang calon pilihan 'atas' keluar jadi pemenang—apa pun caranya termasuk yang bertentangan demokrasi²².

Kedua, Ma'ruf Amin yang siap berduet dengan Saifullah Yusuf setelah Gus Dur terpilih memilih mundur dari arena muktamar. Padahal menurut kalkulasi Ma'ruf-Yusuf telah memperoleh dukungan kuat kyai dan beberapa DPW.

Ketiga, Muhaimin yang terpilih bukan tanpa saingan. Tapi semua pesaingnya akhirnya gugur dan mundur. Saifullah mundur, setelah Ma'ruf gagal dalam pencalonan Dewan Syuro. Lalu, pengurus Jatim dan Jateng pun pamitan. Bersama beberapa wilayah dan 226 cabang menarik diri dari muktamar. Kandidat lain, Muhammad A.S. Hikam, tak hanya mundur dipencalonan, tapi juga mengajak muktamirin memboikot sidang. Muktamar ini sudah tercederai. Banyak terjadi utak-atik aturan muktamar untuk memenuhi ambisi pribadinya²³.

Tiga catatan ini menunjukkan betapa rawannya AD/ART. AD/ART sebagai aturan main dalam partai dinodai dengan sengaja olah orang-orang yang lantang berteriak demokrasi. Gus Dur yang dikenal dan dinobatkan sebagai pembela demokrasi ternyata ambil bagian dari proses yang tidak demokratis. Bahkan tanpa protes. Dan Gus Dur pun menikmatinya

Lazimnya proses pemilihan yang demokratis, seharusnya ada tata cara pemilihan. Ada agenda dan tahapan cara kemudian ada cara pemilihan yang sebelumnya disepakati bersama. Inilah yang dilanggar PDIP-PKB. Acara belum sampai pada tahap pemilihan, baru tahap pemandangan umum, tapi 'dipotong' dengan melontarkan penawaran agar

²² *Ibid.*

²³ *Ibid.*

tokoh dikukuhkan sebagai Ketua umum secara 'aklamasi'! Karena dianggap suara mayoritas setuju²⁴. Ironis!

Tipologi Konflik PKB dan PDIP

Setelah membahas penyebab konflik yang terjadi dalam tubuh partai PKB dan PDIP. Maka bagian ini akan menfokuskan diri pada tipologi konflik. Dalam tipologi ini penulis akan membandingkan dengan menggunakan dua parameter yang sama yakni konflik pada level DPP yang bisa juga disebut konflik horizontal dan konflik pada level vertikal yakni DPP berhadapan DPD/DPW.

1. PKB

▪ Konflik dalam tubuh DPP PKB

Konflik PKB di jajaran dewan pimpinan partai lebih terlihat antara perseteruan antara Matori selaku Ketua Umum berhadapan dengan Dewan Syuro yakni Gus Dur. Perseteruan keduanya dimulai ketika Matori menginginkan supaya PKB mendukung Megawati. Langkah ini berhasil diarahkan melalui rapat pimpinan (Rapim). Dan selanjutnya Matori tetap konsisten pada pilihannya itu untuk memberi kesempatan kepada Megawati sebagai calon presiden. Langkah ini tentu saja bertentangan dengan Gus Dur dengan elit lainnya yang ada di tubuh PKB. Yang mana pada saat itu Gus Dur juga dicalonkan sebagai kandidat presiden melalui Koalisi Poros Tengah.

Alwi Shihab, salah seorang Ketua DPP PKB, mengecam sikap Matori, yang bersikukuh mencalonkan Megawati. Ketegangan antara kelompok Matori yang mencalonkan Megawati versus Alwi Shihab yang mencalonkan Gus Dur terus berlangsung tanpa ada yang bisa menengahi²⁵.

Jika kasus di atas terjadi pada tahun 1999. Maka pada tahun 2001 perseteruan kembali terjadi antara Matori dengan beberapa pimpinan di tubuh PKB. Bambang Setiawan dan Bestian Nainggolan dalam *Partai-Partai Politik di Indonesia* menyebutkan tiga tindakan indiscipliner Matori yang menyebabkan PKB dilanda konflik:

²⁴ *Majalah Tempo*, 8 Mei 2005

²⁵ Arief Mudatsir Mandan, *Memilih Gus Dur Menjadi Presiden*, Jakarta, GPR-FIS, 2000. hlm. 87.

Pertama, Matori hadir dalam sidang Paripurna DPRD tanggal 1 Februari 2001 yang menjatuhkan Memo 1 terhadap Gus Dur. Padahal, dalam rapat gabungan DPP PKB dan FKB DPR sebelumnya yang dihadiri Matori, diputuskan bahwa seluruh anggota FKB akan walk out apabila Sidang Paripurna DPR menjatuhkan memo 1. Matori yang menolak hasil rapat dan menyatakan tidak akan hadir dalam sidang Paripurna DPR, ternyata hadir.

Kedua, Matori menghadiri Sidang Paripurna DPR tanggal 30 Mei 2001 yang memutuskan menggelar Sidang Istimewa. Kembali, Matori menolak keputusan rapat FKB sebelumnya, yang memutuskan untuk walk out dan menyatakan tidak bertanggung jawab atas keputusan DPR.

Ketiga, berpuncak pada Sidang Istimewa tanggal 21 Juli 2001 yang menggulingkan Gus Dur dari kursi kepresidenan. Meskipun FKB MPR menginstruksikan anggotanya untuk tidak hadir dalam SI itu, namun Matori hadir dan menyetujui hasil SI²⁶.

Atas tindakan indiscipliner itu, maka pada hari yang sama, 21 Juli 2001, rapat pleno DPP PKB yang dihadiri anggota FKB MPR memutuskan untuk menghentikan Matori dari jabatannya sebagai Ketua Umum PKB. Pemecatan Matori kemudian dikukuhkan dalam Mukhtamar Luar Biasa PKB di Yogyakarta. Matori yang sebelumnya terpilih dalam Mukhtamar 2000, digantikan oleh Alwi Shihab. Kendati pun demikian Matori menolak pemecatan itu dan tetap mempertahankan jabatannya sebagai Ketua Umum PKB, yang kemudian lebih dikenal sebagai 'PKB Batutulis' karena berkantor di Jalan Batutulis, sementara PKB yang dipimpin Alwi dikenal sebagai 'PKB Kuningan' lantaran berkantor di kawasan Kuningan. Konflik ini diselesaikan melalui pengadilan, yang akhirnya dimenangkan oleh PKB pimpinan Alwi Shihab²⁷.

▪ *Konflik Tingkat DPP dengan DPD Provinsi/DPC*

Jika penjelasan di atas bergerak pada konflik pada tataran Pengurus Pusat PKB atau berada pada lingkaran oligarki elit. Maka pada bagian ini akan mengedepankan konflik elit secara vertikal. Yakni konflik DPP PKB

²⁶ Bambang Setiawan dan Bestian Nainggolan *Partai-Partai Politik di Indonesia* Jakarta, Kompas, 2004. hlm. 256.

²⁷ Lili Romli (ed), *Potret Partai Politik Pasca Orde Baru*, Jakarta: LIPI, 2003. hlm.90.

Jakarta berhadapan dengan Dewan Pimpinan Wilayah di Jawa Timur pada pemilihan Gubernur 2003-2008.

Konflik antara DPP Jakarta dengan DPW Jatim terjadi ketika pengusungan calon gubernur. DPW Jatim bersama dengan para kyai NU melakukan penjaringan hingga membentuk Tim Sepuluh. Selama proses penjaringan itu DPW PKB bekerja keras dengan menghasilkan duet antara Saifullah Yusuf-Imam Utomo. Namun duet ini tidak terlaksana sesuai dengan rencana karena Imam Utomo sudah terlanjur 'dipinang' oleh PDIP. Akibatnya adalah DPW PKB Jawa Timur memutuskan untuk mengajukan paket sendiri.

Dalam suasana seperti itu, DPP PKB menyodorkan nama Abdul Kahfi Bakri yang justru tidak begitu akrab di lingkungan politik Jatim. Namun nama ini malah menjadi kandidat terkuat sehingga pilihan DPW Jatim terpentak, tak terkecuali Saifullah Yusuf yang *notabene* dijagokan sekaligus Sekjen DPP PKB. Terpilihnya Abdul Kahfi Bakri menambah "gosip politik". Sinyalemen yang beredar mengatakan bahwa Kahfi sengaja 'didrop' oleh Ketua Dewan Syuro PKB Gus Dur. Ironisnya, meskipun terjadi penolakan yang luas Kahfi tetap dicalonkan. Dan hasil akhir dari pencalonan Kahfi adalah pukulan yang berupa 'kekalahan'²⁸.

Apa yang dilakukan oleh DPP PKB terhadap pilgub di Jatim menggambarkan bahwa peran Dewan Syuro begitu dominan. Peran ini mengingatkan kita pada masa Soeharto yang mengembangkan 'politik restu' terhadap semua calon yang mau menduduki jabatan politik. Pelembagaan 'politik restu' inilah yang sedang digalakkan, baik Ketua Dewan Syuro maupun DPP PKB.

2. PDIP

▪ Konflik dalam tubuh DPP

Ada dua kasus yang ingin dijelaskan pada bagian ini. *Pertama*, konflik yang terjadi karena 'politik kutu loncat'. *Kedua*, kemarahan kelompok pembaharuan terhadap 'the gang of three'. Untuk yang pertama masuknya kader baru yakni Jacob Tobing (sebelumnya adalah kader Golkar), Theo

²⁸ Bagian banyak diambil dari tulisan Lili Romli (ed), *Poret Partai Politik Pasca Orde Baru*, Jakarta: LIPI, 2003. khususnya Bab 3.

Syafei dan Arifin Panigoro sebetulnya mendapat resisten dari kader PDIP itu sendiri.

Kehadiran tokoh ini sudah barang tentu menggusur kader lama yang loyal pada kepemimpinan Megawati yang semenjak kongres Luar Biasa PDI di Surabaya 1996, peristiwa 27 Juli 1996 menemaninya. Seperti yang dialami oleh Haryanto Taslam dan kawan-kawan. Dengan tersingkirnya elit lama PDIP menyebabkan terjadi friksi dalam tubuhnya. Kelompok Taslam dan Eros Djarot terkenal sebagai kelompok progresif yang ingin membersihkan PDIP dari penumpang gelap partai yang hanya memanfaatkan partai untuk kepentingan politik masing-masing individu. Kubu progresif ini akhirnya tersingkir dan digulung oleh kekuatan oligarkis di sekitar Megawati.

Tersingkirnya kelompok kritis dalam tubuh PDIP bukan berarti semangat itu hilang begitu saja. Buktinya, ketika PDIP mengalami kekalahan pada pemilu 2004 yang dilanjutkan dengan kekalahan pada pemilihan presiden, Kwik Kian Gie tiba-tiba berteriak lantang sekaligus mengecam *'the gang of three'* (Sutjipto, Pramono Anung dan Gunawan) serta menyerukan supaya Sonny Keraf dan Cornelis Lay diusir dari PDIP. Kwik juga mengusung pembersihan dan pemurnian dalam tubuh PDIP²⁹.

Apa yang dilakukan Kwik sebenarnya sama dengan apa yang dilakukan oleh kubu progresif yang dimotori Taslam dan Eros. Terhadap suara lantang Kwik membuat Sutjipto berang. Hal ini terbaca dari pernyataan:

Sutjipto mengaku tidak mengerti maksud Kwik menggelar gerakan pemurnian dan pembersihan di tubuh PDIP. Baginya, 'gang tiga' mundur? Ada aturan mainnya. Cara-cara yang ditempuh Kwik sudah kebangatan. Ia bahkan menyebutkan Kwik sedang keblinger. Sebab, seluruh permasalahan partai adalah tanggung jawab kolektif³⁰.

Konflik terbuka antara Kwik dan Sutjipto terus berlangsung – berlanjut dan kita tidak tahu pasti kapan konflik itu berakhir. Konflik dalam Partai Banteng Moncong Putih ini terus mengalir seperti air. Celakanya lagi adalah di setiap konflik tidak pernah terselesaikan secara organisatoris tetapi lebih pada penyelesaian politis.

²⁹ *Majalah Tempo*, 10 Oktober 2004

³⁰ *Ibid.*

▪ *Konflik Tingkat DPP dengan DPW/DPC*

Gang tiga adalah kelompok yang mendapat perlawanan, baik dalam tubuh DPP PDIP sebagaimana dijelaskan sebelumnya maupun serangan dari DPW. Contoh konkret perlawanan yang berujung pada sikap daerah terpecah nampak pada saat membahas Koalisi Kebangsaan PDIP-Golkar-PPP-PBR-PDS. Tidak semua pengurus daerah sepakat dengan pengurus pusat. Bahkan, mayoritas daerah menolak Koalisi Kebangsaan. Daerah-daerah melihat koalisi tidak akan jalan dan tidak ada gunanya. Koalisi ini tidak bisa diharapkan hasilnya³¹.

Meskipun DPW menolak dengan segala argumentasinya. Megawati tidak mau tahu tentang hal itu. Bahkan dengan enteng Mega mengatakan "koalisi bersifat permanen". Pernyataan Mega tidak menyurutkan niat DPW untuk selalu "mempertanyakan, bahkan meminta agar tidak diteruskan". Namun sang Ketua Umum PDIP tetap pada pendiriannya. Kekeraskepalaan Mega termanifestasikan lewat Sekjenya, Sutjipto yang mengatakan "dalam rapat nasional sudah mendukung kerjasama sinergis Koalisi Kebangsaan". Lagi-lagi pernyataan Sekjen sangat mengecewakan kader PDIP. Ini manipulasi fakta, kata Roy Janis³².

Selain perpecahan karena persoalan sikap politik terhadap koalisi antara DPP PDIP dengan DPW yang ada di tingkat provinsi. Patut pula dicatat bahwa kebijakan DPP PDIP yang selalu menerima 'politisi lompat pagar' atau 'politisi kutu loncat' juga dikeluhkan oleh pengurus daerah. Banyak politisi lompat pagar yang tiba-tiba menduduki struktur penting dalam organisasi PDIP. Sementara para kader yang meniti karir dan menjadi anggota di tingkat ranting, tersingkirkan. Karena itu kader daerah biasanya tidak menerima kehadiran mereka³³.

Yang terakhir adalah DPP PDIP yang selalu mengusung calon yang berbeda dengan yang dikehendaki oleh aktivis partai di tingkat Dewan Pimpinan Cabang ataupun Dewan Pimpinan Wilayah. Perbedaan ini seringkali berimbas pada timbulnya konflik internal dalam tubuh PDIP yang berujung pada tindakan pemecatan dan penonaktifkan kader partai atas perintah DPP.

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid.*

³³ Riswandha Imawan "Mengapa Mega Kalah" *Kedaulatan Rakyat*, (tt)

Sekedar contoh. Perintah DPP PDIP yang bertentangan dengan aspirasi bawah terlihat pada saat DPP PDIP mengamankan Gubernur Jawa Tengah Mardiyanto yang mencalonkan diri lagi sebagai Gubernur pada bulan Juli 2003. Padahal PDIP setempat sudah mencalonkan Mardijo. Karena Mardiyanto yang didukung oleh DPP PDIP maka ia pun terpilih menjadi Gubernur, sementara Mardijo harus menanggung sanksi pencopotan atau *recall* oleh DPP PDIP.

Hal yang sama juga terjadi pada pemilihan Gubernur Jakarta. DPP PDIP mendukung Sutiyoso bahkan Mega langsung menunjuk dan memberi dukungan. Padahal DPD PDIP sudah mencalonkan Tarmidi Suhardjo. Sekalipun Tarmidi tidak didukung oleh DPP PDIP ia tetap maju mencalonkan diri. Bahwa Tarmidi kalah dalam pertarungan iya. Tapi ada yang menarik dari kenekatannya itu yakni keluar dari PDIP dan bergabung dengan partai nasionalis lainnya³⁴.

Tiga Implikasi

Dari seluruh narasi di atas berisikan tentang konflik yang terjadi dalam tubuh PKB dan PDIP. Dengan membandingkan konflik internal kedua partai ini membuat kita pesimis akan eksistensi dan masa depan PKB dan PDIP. Pesimis kita sangat beralasan dengan memperhatikan implikasi destruktif yang dihasilkan oleh konflik internal PKB dan PDIP. Paling minimalis ada tiga implikasi yang disebutkan.

Pertama, ketidakmampuan PKB dan PDIP dalam mengelola konflik internalnya membuat masyarakat tidak lagi berharap akan sumbangsuhnya dalam menyelesaikan problem bangsa. Pupusnya harapan masyarakat terhadap partai politik diperkuat oleh temuan Kompas. Dalam jajak pendapat yang dilakukan pada bulan April terungkap sebanyak 56% responden menilai konflik internal partai politik telah memberikan contoh buruk bagi pendidikan politik di Indonesia³⁵.

Kedua, konflik yang dipertontonkan PKB-PDIP lebih mencerminkan sebagai proses 'sirkulasi elit' yang terpusat pada tokoh Megawati di PDIP dan Gus Dur di PKB, kata Anton Djawamaku. Dominasi kepemimpinan partai ke dalam tangan DPP dan reaksi lawan DPD/DPW seringkali

³⁴ Bambang Setiawan dan Bestian Nainggolan, *op.cit.* hlm. 364.

³⁵ *Kompas*, 26 September 2005.

berakhir dalam 'politik bedah bambu' yaitu satu diangkat –dimenangkan, yang lain diinjak –dikalahkan³⁶. Kebijakan politik bedah bambu ini mendorong orang yang kalah untuk mencari saluran politik yang lain yakni membentuk partai atau pindah ke partai lain.

Ketiga, konflik yang terjadi, baik di PKB-PDIP berakhir dengan perpecahan. Sejumlah kader PDIP yang terlibat dari konflik, baik karena pola kepemimpinan maupun pengorganisasian mendirikan partai, misalnya PNBK, PITA dan PDP³⁷. Nasib yang sama juga terjadi di tubuh PKB dengan lahirnya Partai Kebangkitan Nasional (PKN) yang dipelopori Matori. Sialnya lagi meminjam bahasa Sultani partai sempalan ini masih menggunakan nama dan simbol yang tidak jauh dari partai induknya.

Perpecahan partai di PKB dan PDIP yang sama-sama melahirkan partai sempalan sebenarnya bukanlah hal baru dalam tradisi politik di Indonesia. Catatan Daniel Dhakidae menyebutkan bahwa:

Perpecahan-perpecahan partai politik sudah terjadi tahun 1920-an dengan konsekuensi terhadap ragam perjuangan kemerdekaan; hal yang sama terjadi pada tahun 1955 yang membawa konsekuensi politik kepartaian jauh lebih dalam terutama tentang bagaimana mengolah demokrasi dan mengolah Negara yang kelak dalam bentuk eksekutif melahirkan PRRI-PERMESTA. Sementara yang sekarang jauh lebih berbeda karena yang diperebutkan adalah sumberdaya; politik dan ekonomi³⁸.

Tiga implikasi di atas merupakan pukulan terhadap PKB dan PDIP. Ketidakmampuan kedua partai ini dalam mengelola konflik dalam tubuhnya akan menjadi ancaman yang serius akan masa depannya. Bersamaan dengan itu, kita juga akan selalu disuguhi lahirnya partai baru atau partai sempalan yang merupakan bentuk perlawanan terhadap partai induknya. Inilah yang sedang terjadi. Inilah realitas faktual yang menceritakan betapa mudahnya PKB dan PDIP pecah, lalu beranak pinak.

³⁶ Ramlan Surbakti 'Perkembangan Partai Politik di Indonesia' dalam Henk Schulte N dan Gusti Asnan *Indonesia in Transition: Work in Prosess*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2003. hlm. 57.

³⁷ Sultani, op.cit.

³⁸ Daniel Dhakidae 'Politik, Demokrasi dan Oligarki, dalam Bambang Setiawan dan Bestian Nainggolan, *Partai-Partai Politik di Indonesia* Jakarta: Kompas, 2004. hlm. 7.

Simpulan

Sebagai catatan akhir, penulis ingin mengatakan bahwa tulisan ini masih jauh dari sempurna. Masih banyak informasi yang tercecer, yang belum secara baik terangkum, sebagai akibat dari ketidakmampuan penulis dalam meracik, membangun dan mengembangkan argumentasi dalam membandingkan konflik yang terjadi dalam tubuh PKB dan PDIP. Hal ini terjadi karena banyaknya data dan informasi yang dikumpulkan sementara waktu penulisannya terbatas.

Akhirnya, saya ingin menutup tulisan ini dengan menghadirkan kembali spirit keilmuan Riswandha Imawan yang mengatakan; ilmuwan mengawali pekerjaannya dengan ketidakpuasan, dan akan sampai pada titik yang sama. Kita bertugas mencari penjelasan terbaik. Itu artinya, mustahil bisa dicapai hanya seorang diri tanpa bantuan orang lain³⁹.

Daftar Pustaka

A. Buku

- Bulkin, Farchan (ed). 1991. *Analisa Kekuatan Politik di Indonesia*, Jakarta: LP3ES.
- Dhakidae, Daniel 'Politik, Demokrasi dan Oligarki', dalam Bambang Setiawan dan Bestian Nainggolan. 2004. *Partai-Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: Kompas.
- Elisabeth Andriana, dkk, 1991. *PDIP dan Prospek Pembangunan Politik*, Jakarta: Grasindo.
- Haris, Syamsuddin 'Potret PKB: Peta Konflik dan Resistensi Elit Lokal Terhadap Pusat' dalam Lili Romli (ed), 2003. *Potret Partai Politik Pasca Orde Baru*, Jakarta: LIPI.
- Mandan, Arief Mudatsir, 2000. *Memilih Gus Dur Menjadi Presiden*, Jakarta: GPR-FIS.
- Mall, Hugh dkk. 2002. *Resolusi Damai Konflik Kontemporer*. Jakarta: Rajawali.
- Romli, Lili (ed). 2003. *Potret Partai Politik Pasca Orde Baru*, Jakarta: LIPI.

³⁹ Riswandha Imawan 'Politik Indonesia Pasca Pemilu 1997'. Makalah yang disampaikan di CSIS, tanggal 28 Agustus 1997.

Setiawan, Bambang dan Bestian Nainggolan. 2004. *Partai-Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: Kompas.

Surbakti, Ramlan. 1992. *Memahami Ilmu Politik* Jakarta: Grasindo.

_____, 'Perkembangan Partai Politik di Indonesia' dalam Henk Schulte N dan Gusti Asnan. 2003. *Indonesia in Transition: Work in Process*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Simanjuntak, Salomon. 2002. *Indonesia Dalam Krisis 1997-2002*. Jakarta: Kompas.

Thoha, Indris (ed). 2004. *Pergulatan Partai Politik di Indonesia*, Jakarta: Rajawali,

B. Jurnal dan Makalah

Agustino, Leo. 2004. 'Konflik dan Pembangunan', *Jurnal Analisis CSIS*, Vol, 33, No.3.

Djawamaku, Anton. 2005. 'Perpecahan Parpol, Pemberantasan Korupsi dan Berbagai Masalah Lainnya', *Analisa CSIS*, Vol. 34.

Haris, Syamsuddin. 1988. 'Pola dan Kecenderungan Konflik Partai Politik Masa Orde Baru', *Jurnal Analisis CSIS*

Haboddin, Muhtar. 'Mengurai Perpecahan Partai Politik', Makalah Mata Kuliah Politik Indonesia Kontemporer, Tahun Ajaran 2007.

Imawan, Riswandha. 'Politik Indonesia Pasca Pemilu 1997'. Makalah yang disampaikan di CSIS, tanggal 28 Agustus 1997.

C. Majalah dan Koran

Majalah Tempo 22 Mei 2005; 28 Agustus 2005; 1 Mei 2005; 8 Mei 2005

Majalah Tempo, 10 Oktober 2004

Bali Pos, 12 Februari 2005

Kompas, 3 Desember 2001; 31 Maret 2005; 26 September 2005; 2 Oktober 2006; 24 April 2007.

Kedaulatan Rakyat, (tt)

Sinar Harapan, 3 Desember 1978.